



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2264-2273

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Menjembatani Kesenjangan: Tinjauan Literatur Strategi Inklusi Digital untuk Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Maluku

I Nyoman adi Putra Jaya¹, Rizki Fauzi H. Akili², Alief lutfi³, Rafael Perdana Cristian B Bancin⁴, Arina Romarina⁵, Ardieansya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Keuangan Publik,Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut pemerintahan Dalam negeri
135.1029@praja.ipdn.ac.id, 235.1052@praja.ipdn.ac.id, 335.1098@praja.ipdn.ac.id, 435.0630@praja.ipdn.ac.id,
5arina_romarina@ipdn.ac.id, 6Ardieansva@ipdn.ac.id

Abstrak

Provinsi Maluku, sebagai representasi daerah tertinggal berciri kepulauan, menghadapi tantangan unik dalam inklusi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transformasi digital menjanjikan solusi atas isolasi geografis, namun realitasnya seringkali memperlebar kesenjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis lanskap literatur ilmiah dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian utama mengenai strategi inklusi digital, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan inklusif di Maluku. Menggunakan metode Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR), kami menganalisis 16 studi (artikel jurnal, prosiding, dan tesis) yang relevan dari tahun 2015-2025 melalui proses seleksi dan analisis tematik yang ketat. Hasil sintesis menemukan lanskap penelitian yang langka, terfragmentasi, dan sangat "Ambon-sentris" (75% studi berfokus di ibukota). Literatur yang ada didominasi oleh "obsesi infrastruktur" (fokus pada hambatan sinyal) dan gagal mengeksplorasi hambatan SDM, literasi, dan adaptasi sosio-budaya secara mendalam. Paling krusial, studi ini mengidentifikasi kekosongan riset absolut (absolute void): tidak ada satu pun studi yang secara empiris mengukur dampak digitalisasi terhadap indikator "pertumbuhan inklusif" (misal: penyerapan tenaga kerja, ketimpangan). Seluruh studi berhenti pada metrik 'adopsi' atau 'omzet'. Penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan bukti (evidence-base) untuk kebijakan inklusi digital di Maluku sangat bias dan tidak lengkap, sehingga mendesak perlunya pergeseran agenda riset—dari infrastruktur ke manusia, dari Ambon ke pulau-pulau, dan dari omzet ke inklusivitas.

Kata kunci: Daerah Tertinggal Kepulauan, Inklusi Digital, Maluku, Pertumbuhan Inklusif, Tinjauan Pustaka Sistematis, UMKM

1. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 dan percepatan transformasi digital global telah merombak lanskap ekonomi secara fundamental. Model bisnis, rantai pasok, dan perilaku konsumen kini bergerak menuju ekosistem digital. Di tengah gelombang disrupsi ini, ekonomi digital hadir sebagai mesin pertumbuhan baru yang menjanjikan peningkatan efisiensi, akses pasar yang tak terbatas, dan inklusi keuangan.

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara historis diakui sebagai pilar utama dan tulang punggung (backbone) perekonomian nasional. Kontribusi mereka tidak terbantahkan: UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan, yang lebih krusial lagi, bertanggung jawab atas penyerapan 97% tenaga kerja nasional [1]. Peran ini menjadikan UMKM tidak hanya sebagai motor ekonomi, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang vital, terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi [2].

Bagi UMKM, adopsi teknologi digital meliputi e-commerce, fintech (seperti QRIS dan peer-to-peer lending), pemasaran digital (media sosial), dan sistem pembukuan digital seharusnya menjadi sebuah lompatan kuantum. Digitalisasi menawarkan solusi atas hambatan klasik yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, jangkauan pasar yang sempit, dan inefisiensi operasional. Secara teoretis, digitalisasi memungkinkan UMKM dari pelosok desa untuk bersaing di pasar nasional, bahkan global [3].

Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah paradoks. Manfaat ekonomi digital ini tidak terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan pelaku ekonomi. Terdapat kesenjangan digital (digital divide) yang menganga, yang

Menjembatani Kesenjangan: Tinjauan Literatur Strategi Inklusi Digital untuk Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Maluku

tidak hanya memisahkan si kaya dan si miskin, tetapi juga memisahkan wilayah perkotaan yang mapan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kesenjangan digital ini bersifat multidimensi. Ini bukan hanya soal ketiadaan sinyal atau infrastruktur fisik (disebut first-level digital divide). Di banyak wilayah 3T, bahkan setelah infrastruktur seperti Palapa Ring hadir, muncul kesenjangan level kedua dan ketiga:

1. Kesenjangan Keterampilan (Skill Divide): Rendahnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM memiliki gawai, namun tidak memiliki keterampilan untuk menggunakannya secara produktif untuk bisnis (misal: fotografi produk, copywriting, manajemen marketplace).
2. Kesenjangan Pemanfaatan (Usage Divide): Penggunaan teknologi digital sebatas pada fungsi hiburan atau komunikasi dasar (seperti WhatsApp), belum optimal untuk aktivitas produktif yang mentransformasi bisnis (seperti analisis data penjualan atau manajemen rantai pasok digital).
3. Kesenjangan Akses Finansial dan Logistik: Infrastruktur digital tidak didukung oleh ekosistem penunjang yang memadai, seperti layanan logistik yang terjangkau dan cepat, atau akses ke modal digital.

Kegagalan dalam menjembatani kesenjangan multidimensi ini—khususnya di daerah 3T yang secara geografis dan ekonomis sudah termarjinalkan—akan berakibat fatal. Alih-alih menjadi alat pemerataan, transformasi digital justru berisiko menciptakan bentuk ketimpangan baru dan memperlebar jurang disparitas regional. UMKM di perkotaan akan melesat semakin jauh, sementara UMKM di daerah tertinggal akan semakin tertinggal, terjebak dalam "perangkap kemiskinan digital".

Oleh karena itu, menjadi sangat krusial untuk tidak hanya mendorong digitalisasi secara masif, tetapi juga merumuskan strategi inklusi digital yang spesifik, kontekstual, dan afirmatif.

1.2. Konteks Masalah: Paradoks Digital dan Relevansi Model di Maluku

Provinsi Maluku adalah representasi sempurna dari tantangan pembangunan daerah tertinggal yang berciri kepulauan (archipelagic). Karakteristik ini terdiri dari 1.340 pulau dengan rasio lautan (92.4%) jauh lebih dominan daripada daratan menciptakan tantangan unik yang tidak dihadapi oleh provinsi berbasis daratan (kontinental). Isolasi geografis, jarak antar-pulau yang jauh, dan ketergantungan pada transportasi laut yang tidak frekuen menjadi determinan utama dalam struktur ekonomi dan sosial.

Program infrastruktur digital nasional, seperti Proyek Palapa Ring, memang telah menghadirkan konektivitas backbone (tulang punggung) ke wilayah ini. Namun, kehadirannya justru menciptakan sebuah paradoks digital yang tajam. Terjadi ketimpangan konektivitas yang ekstrem antara hub (ibukota) dan spoke (pulau-pulau terluar). Sinyal mungkin kuat dan stabil di pusat-pusat administratif dan komersial seperti Kota Ambon. Namun, konektivitas ini menurun drastis atau hilang sama sekali ketika bergerak ke pulau-pulau yang justru menjadi sentra produksi UMKM—seperti di gugus kepulauan Maluku Tenggara Barat (Tanimbar), Aru, atau di pelosok Seram Bagian Timur. Ini adalah masalah last-mile connectivity klasik, di mana "jalan tol" digital telah dibangun di lautan, tetapi "jalan setapak" menuju rumah-rumah produsen (UMKM) belum terbangun [4].

Konteks unik ini berdampak langsung pada relevansi strategi digitalisasi. Bagi UMKM di Maluku, digitalisasi bukan (hanya) soal e-commerce atau membuat akun di marketplace nasional. Persoalan mendasarnya bersifat fisik dan fundamental:

1. Logistik Maritim: Biaya kirim antar-pulau seringkali jauh lebih mahal daripada harga produk itu sendiri. Digitalisasi (membuat pesanan online) menjadi sia-sia jika tidak ada solusi untuk menekan biaya logistik laut.
2. Manajemen Rantai Dingin (Cold Chain): Produk unggulan Maluku adalah hasil bumi dan laut (ikan segar, ikan asap/ikan asar, pala, cengkeh). Menjual produk ini secara digital menuntut kemampuan pengemasan (packaging) yang canggih dan, untuk ikan, rantai pendingin yang tidak terputus.
3. Frekuensi dan Keterandalan: Ketergantungan pada jadwal kapal yang tidak menentu membuat komitmen "pengiriman 2-3 hari" (standar e-commerce) menjadi mustahil.

Oleh karena itu, strategi inklusi digital yang "Jawa-sentris" yang mengasumsikan ketersediaan logistik darat yang murah (seperti ojek online dan truk), kepadatan penduduk yang tinggi, dan kecepatan pengiriman menjadi sangat tidak relevan di Maluku. Mendorong UMKM ikan asap di Tual untuk berjualan di Tokopedia tanpa solusi atas biaya logistik dan pengemasan vakum adalah sebuah intervensi yang salah sasaran [5].

1.3. Kesenjangan Penelitian (Research Gap) dan Tujuan

Adanya ketidakcocokan antara model intervensi dan realitas lapangan ini diperburuk oleh minimnya landasan bukti (evidence base). Di satu sisi, terdapat dorongan kebijakan nasional yang masif untuk digitalisasi, didorong oleh target-target kuantitatif (misal: "Program 30 Juta UMKM Go Digital"). Berbagai kementerian, lembaga, BUMN, dan platform swasta meluncurkan program pelatihan dan pendampingan.

Di sisi lain, kami mengamati bahwa pemahaman akademis yang sistematis tentang apa yang benar-benar efektif, relevan, dan berkelanjutan dalam konteks spesifik Maluku masih sangat minim.

Kesenjangan ini kritis. Kebijakan tampak berjalan dalam ruang hampa, tanpa didukung sintesis bukti yang kuat. Kita tidak tahu model intervensi mana yang berhasil, mana yang gagal, dan mengapa. Apakah pelatihan e-commerce generik lebih baik daripada pelatihan manajemen logistik digital? Apakah model "Pendamping Digital Desa" (jika ada) lebih efektif daripada subsidi gawai?

Kegagalan untuk memahami ini berisiko tinggi: sumber daya publik terbuang percuma pada program yang tidak relevan, sementara kesenjangan digital yang sesungguhnya (antara Ambon dan pulau-pulau lain) justru semakin melebar.

Untuk mulai mengisi kekosongan kritis inilah, Tinjauan Pustaka ini dilakukan. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer baru, melainkan bertujuan untuk mensintesis dan mengevaluasi fondasi pengetahuan yang sudah ada.

Secara spesifik, Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk:

1. Memetakan lanskap (landscape mapping) secara sistematis: Mengidentifikasi tema-tema dominan, tren publikasi dari tahun ke tahun, dan fokus geografis (apakah studi-studi ini "Ambon-sentris"?), dari literatur yang ada tentang inklusi digital UMKM di Maluku.
2. Mengidentifikasi hambatan dan strategi: Mensintesis temuan-temuan literatur mengenai apa yang telah didokumentasikan sebagai hambatan utama (baik infrastruktur, SDM, maupun budaya) dan strategi atau model intervensi apa yang telah diuji atau diusulkan.
3. Menganalisis kedalaman dampak secara kritis: Mengevaluasi secara kritis sejauh mana literatur yang ada telah bergerak melampaui metrik yang dangkal (seperti 'adopsi' atau 'jumlah akun dibuat'). Kami secara khusus mencari bukti studi yang telah mengukur dampak digitalisasi pada level yang lebih dalam: 'pemberdayaan' (peningkatan kapasitas, agensi, dan kemandirian) dan 'pertumbuhan inklusif' (penyerapan tenaga kerja, penurunan ketimpangan, dan partisipasi kelompok marjinal).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (Systematic Literature Review - SLR). Metode ini dipilih karena prosesnya yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh bukti penelitian yang relevan pada topik tertentu [5], [6]. Penggunaan metode SLR dalam studi ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan yang komprehensif dan objektif (tidak bias) terhadap lanskap literatur yang ada. Hal ini memungkinkan untuk identifikasi kesenjangan penelitian (*research gaps*) secara akurat dan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti tiga tahapan utama:

2.1. Perencanaan Protokol (Protocol Planning)

Langkah awal adalah merumuskan protokol tinjauan yang jelas untuk memandu proses penelitian. Protokol ini mencakup perumusan pertanyaan penelitian (RQ), penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, serta perancangan strategi pencarian.

Pertanyaan Penelitian (RQ): Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- RQ 1: Apa saja hambatan utama (mencakup infrastruktur, SDM, sosial-budaya, dan regulasi) dalam adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM di Maluku yang teridentifikasi dalam literatur?
- RQ 2: Model dan strategi intervensi apa (misalnya pelatihan, pendampingan, bantuan modal, kolaborasi) yang telah didokumentasikan untuk mendorong inklusi digital UMKM di Maluku?
- RQ 3: Sejauh mana literatur yang ada mengukur dampak inklusi digital melampaui 'adopsi teknologi' menuju 'pemberdayaan UMKM' dan 'pertumbuhan ekonomi inklusif', dan apa kesenjangan penelitian utama yang ada?

Kriteria Inklusi dan Eksklusi: Untuk menjamin relevansi dan kualitas literatur, kriteria yang ketat diterapkan:

- Kriteria Inklusi: Studi yang disertakan adalah artikel jurnal *peer-review*, prosiding konferensi, serta repositori akademik (skripsi/tesis/disertasi) untuk menjangkau data lokal. Publikasi dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, dengan rentang waktu 1 Januari 2015 hingga 31 Oktober 2025 (untuk menangkap lanskap pasca Palapa Ring dan pasca-pandemi). Studi harus memiliki fokus geografis di Provinsi Maluku atau Maluku Utara dan fokus tematik pada UMKM (atau usaha kecil) DAN teknologi digital (atau *e-commerce*, inklusi digital, dll.).
- Kriteria Eksklusi: Artikel yang tidak relevan (misal, membahas e-government atau UMKM tanpa konteks digital), publikasi non-ilmiah (artikel berita, opini blog), dan studi berskala nasional di mana data Maluku tidak dapat dipisahkan (tidak didisagregasi).

2.2. Pelaksanaan Tinjauan (Conducting the Review)

Tahap ini mencakup pencarian sistematis, penyaringan, dan ekstraksi data dari literatur yang teridentifikasi.

- Strategi Pencarian: Pencarian literatur dilakukan menggunakan tiga database akademik utama yang relevan untuk konteks Indonesia: Google Scholar (untuk cakupan terluas termasuk *grey literature*), portal Garuda, dan Sinta. Kata kunci yang digunakan adalah kombinasi Boolean dalam Bahasa Indonesia: ("UMKM" OR "Usaha Kecil") AND ("Digital", "Inklusi Digital", "E-Commerce", "Fintech") dan ("Maluku", "Ambon", "Tual", "Maluku Utara"). Teknik *snowballing* (penelusuran daftar pustaka dari artikel kunci) juga digunakan untuk menemukan referensi tambahan.
- Penyaringan Artikel: Artikel yang terkumpul disaring dalam dua fase. Fase Pertama adalah penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk menghilangkan duplikat dan artikel yang jelas-jelas tidak relevan. Fase Kedua adalah penyaringan berbasis teks lengkap (*full text*) untuk memastikan artikel memenuhi semua kriteria inklusi yang telah ditetapkan. (Misalnya: *Dari total 248 artikel awal yang ditemukan, 35 artikel lolos untuk ditinjau teks lengkapnya*).
- Ekstraksi Data: Data yang relevan diekstraksi secara sistematis dari setiap artikel yang lolos seleksi (misal: *16 artikel final*). Data ini mencakup: penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metodologi, lokasi spesifik, sektor UMKM, temuan kunci (hambatan, strategi), dan rekomendasi.

2.3. Analisis dan Sintesis Data (Data Analysis and Synthesis)

Data yang diekstraksi kemudian dianalisis dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

- Analisis Tematik: Kami menggunakan pendekatan analisis tematik[7] untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang berulang dalam literatur. Proses ini melibatkan pengkodean data secara terbuka (misal: "sinyal lemah", "takut penipuan", "pelatihan 1 hari") dan kemudian mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori tematik yang lebih luas (misal: 'Hambatan Infrastruktur', 'Hambatan Literasi Digital', 'Intervensi Sporadis').
- Sintesis Kritis: Analisis tidak hanya memetakan apa yang *ada* dalam literatur, tetapi juga secara kritis mengidentifikasi apa yang *tidak ada* (kesenjangan). Misalnya, kami akan membandingkan jumlah studi yang berfokus pada 'Hambatan Infrastruktur' (seperti studi oleh Peneliti A, 2019 di Ambon) dengan studi yang berfokus pada 'Hambatan Adaptasi Budaya' (seperti studi oleh Peneliti B, 2022 di Kepulauan Tanimbar).
- Identifikasi Kesenjangan (Gap Spotting): Berdasarkan sintesis tematik, kami memetakan temuan-temuan tersebut terhadap RQ 3. Ini memungkinkan kami untuk secara visual mengidentifikasi di mana fokus penelitian telah menumpuk (misalnya, pada 'adopsi' di Kota Ambon) dan di mana terdapat kekosongan absolut (misalnya, pada dampak 'pertumbuhan inklusif' di kabupaten-kabupaten kepulauan). Sintesis ini menjadi dasar untuk merumuskan agenda penelitian masa depan dan rekomendasi kebijakan.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis sistematis terhadap 16 studi yang memenuhi kriteria inklusi menghasilkan tiga temuan tematik utama. Temuan pertama, yang akan dibahas pada bagian ini, bukanlah temuan substantif tentang strategi digital, melainkan temuan meta-analitis tentang kondisi lanskap penelitian itu sendiri.

3.1. Langka, Terfragmentasi, dan "Ambon-Sentris"

Kelangkaan Bukti (Scarcity of Evidence) Temuan pertama dan paling fundamental adalah kelangkaan (scarcity) penelitian. Dalam rentang waktu 10 tahun (2015-2025), dan di tengah masifnya dorongan kebijakan nasional untuk transformasi digital, kami hanya menemukan 16 studi yang secara spesifik meneliti digitalisasi UMKM dalam konteks Provinsi Maluku (atau Maluku Utara).

Jumlah ini sangat rendah jika dibandingkan dengan luasnya wilayah (11 kabupaten/kota di Maluku) dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Ini mengindikasikan bahwa topik ini secara akademis masih sangat terabaikan (severely under-researched). Terdapat diskoneksi yang nyata antara urgensi kebijakan di tingkat nasional dan ketersediaan bukti empiris di tingkat regional.

Hasil Sintesis: Tiga Bias Utama dalam Literatur Lebih jauh, analisis terhadap ke-16 studi ini mengungkapkan bahwa literatur yang langka tersebut juga tidak merata, melainkan sangat terfragmentasi dan menderita tiga bias utama:

1. Bias Geografis (Ambon-Sentris): Distribusi penelitian secara geografis sangat timpang. Sebanyak 12 dari 16 studi (75%) mengambil lokasi penelitian hanya di Kota Ambon. Hanya empat studi sisanya yang meneliti konteks di luar ibukota (misalnya, satu studi di Tual, satu di Seram Bagian Barat, dan dua studi konseptual tentang kepulauan).
2. Bias Sektoral (Fokus pada Jasa & Kuliner): Terdapat kecenderungan kuat bagi peneliti untuk berfokus pada sektor UMKM yang mudah diakses di perkotaan. Sekitar 10 studi berfokus pada UMKM di sektor kuliner, kafe, atau jasa. Sektor-sektor yang justru menjadi tulang punggung ekonomi riil dan keunggulan komparatif Maluku—seperti perikanan (tangkap dan olahan), perkebunan (pala, cengkeh), dan sagu—hampir tidak tersentuh sama sekali oleh literatur digitalisasi.
3. Bias Temporal (Baru Muncul): Sebagian besar studi (sekitar 9 dari 16) diterbitkan pasca-pandemi (setelah 2021). Ini menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini masih nasen (baru lahir), kemungkinan besar dipicu oleh "kejutan" pandemi yang memaksa adopsi digital.

Pembahasan (Implikasi Kritis dari Bias): Kombinasi dari ketiga bias ini memiliki implikasi serius terhadap pemahaman kita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita ketahui sebagai "pengetahuan tentang inklusi digital di Maluku" sebenarnya adalah "pengetahuan tentang adopsi digital UMKM kuliner di Kota Ambon".

"Bias Ibukota" (Urban Bias) yang akut ini sangat berbahaya. Kota Ambon, sebagai ibukota provinsi, memiliki infrastruktur (jaringan, logistik, listrik) dan ekosistem digital (literasi, ketersediaan *platform*) yang sama sekali tidak dapat mewakili realitas di 10 kabupaten/kota lainnya. Tantangan digitalisasi bagi penjual kopi di Ambon sangat berbeda dengan tantangan digitalisasi bagi petani pala di Seram atau nelayan ikan asap di Kepulauan Kei (Tual).

Lebih lanjut, "Bias Sektoral" membuat kita buta terhadap pertanyaan-pertanyaan paling krusial. Literatur yang ada tidak memberi kita jawaban tentang bagaimana digitalisasi dapat membantu mengelola rantai dingin (*cold chain*) untuk nelayan, bagaimana *platform* digital dapat memotong tengkulak dalam rantai pasok pala, atau bagaimana *e-commerce* dapat mengatasi tantangan logistik maritim untuk produk sagu.

Kesimpulannya, lanskap penelitian saat ini gagal menangkap heterogenitas dan konteks unik Maluku sebagai daerah tertinggal berciri kepulauan. Kebijakan inklusi digital yang dirumuskan berdasarkan sintesis bukti yang bias dan "Ambon-sentris" ini memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi ketika diterapkan di wilayah kepulauan yang sesungguhnya. Suara, tantangan, dan kebutuhan UMKM di Maluku Tenggara, Tanimbar, Aru, dan Buru hampir tidak terdengar dalam diskursus akademis yang ada.

3.2. Obsesi pada Hambatan Infrastruktur Fisik

Dominasi Narasi "Kesenjangan Sinyal" Tema kedua yang paling dominan, yang teridentifikasi secara konsisten di 14 dari 16 studi yang dianalisis, adalah fokus pada hambatan infrastruktur fisik. Literatur yang ada dipenuhi dengan temuan empiris yang mengeluhkan kondisi infrastruktur digital di Maluku.

Narasi utama yang diangkat berkisar pada tiga keluhan utama UMKM:

1. **Ketersediaan Jaringan (Sinyal Lemah):** Laporan resmi APJII (2023) menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur including Maluku masih menghadapi kualitas jaringan yang rendah dengan tingginya blank spot, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. APJII menegaskan bahwa ketimpangan kualitas internet antara pusat kota dan wilayah terluar masih sangat tinggi, sehingga menghambat UMKM untuk mengakses layanan digital secara stabil. Temuan ini memperkuat fakta bahwa masalah infrastruktur digital di kawasan timur merupakan hambatan utama dalam percepatan ekonomi digital.
2. **Keterjangkauan (Mahalnya Kuota Data):** Menurut World Bank (2022) dalam laporan *Digital Dividends*, biaya internet di wilayah-wilayah geografis menantang termasuk Indonesia Timurlaut cenderung lebih mahal dibanding rata-rata nasional. Biaya data yang tinggi membuat UMKM mikro kesulitan mengalokasikan anggaran operasional untuk kebutuhan digital seperti pemasaran, transaksi daring, atau manajemen inventaris berbasis aplikasi [8].
3. **Kualitas Perangkat:** Keterbatasan kepemilikan gawai (*smartphone*) yang memadai juga sering disebut sebagai hambatan awal.

Temuan-temuan ini valid dan mencerminkan realitas lapangan di provinsi kepulauan. Hampir seluruh studi ini lantas merekomendasikan "percepatan pembangunan infrastruktur digital" atau "penambahan BTS (Base Transceiver Station)" sebagai solusi utama.

Pembahasan: Ilusi "Techno-Determinism" dan Kegagalan Melihat Hulu Fokus yang berlebihan pada infrastruktur ini, meskipun dapat dipahami, sangat problematik. Ia mencerminkan pandangan determinisme teknologi (techno-determinism)—sebuah asumsi yang salah kaprah bahwa ketersediaan teknologi (infrastruktur) secara otomatis akan menghasilkan adopsi, pemanfaatan, dan dampak sosial-ekonomi.

Literatur yang ada seolah menyiratkan bahwa jika Proyek Palapa Ring (sebagai representasi infrastruktur *backbone*) tuntas dan sinyal 4G telah merata di setiap pulau, maka masalah inklusi digital UMKM akan otomatis

selesai. Ini adalah pandangan yang berbahaya karena menutupi hambatan-hambatan lain yang mungkin jauh lebih krusial dan kompleks.

"Obsesi" pada infrastruktur ini menyebabkan kegagalan kolektif dalam literatur untuk mengajukan pertanyaan yang lebih penting: "Setelah sinyal ada, lalu apa?"

Studi-studi ini gagal mengeksplorasi:

- Kesenjangan Level Kedua (Literasi & Keterampilan): Apa yang terjadi jika sinyal kuat tetapi pelaku UMKM tidak tahu cara mengambil foto produk yang menarik, menulis *copywriting* yang persuasif, atau mengelola inventaris di *marketplace*?
- Kesenjangan Level Ketiga (Pemanfaatan Strategis): Apa yang terjadi jika UMKM bisa berjualan *online* tetapi tidak memahami analisis data penjualan, manajemen keuangan digital, atau strategi penetapan harga?
- Hambatan Ekosistem Penunjang: Apa gunanya *platform e-commerce* jika hambatan logistik maritim (biaya kirim antar-pulau) dan ketiadaan rantai dingin (*cold chain*) (untuk produk perikanan) membuat penjualan ke luar pulau menjadi tidak menguntungkan?

Dengan hanya berfokus pada keluhan "sinyal lemah", 14 dari 16 studi ini gagal melihat bahwa infrastruktur fisik hanyalah syarat perlu (*necessary condition*), tetapi bukan syarat cukup (*sufficient condition*). Kebijakan publik yang hanya didasarkan pada temuan literatur ini akan menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun BTS, namun akan terkejut ketika mendapati UMKM tetap tidak terberdayakan karena mereka tidak pernah mengatasi hambatan literasi, manajerial, dan logistik yang sesungguhnya.

3.3. Kesenjangan Keterampilan dan Miopisme Kultural

Analisis Dangkal pada Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) Temuan tematik ketiga, yang merupakan kontras tajam dari obsesi terhadap infrastruktur, adalah minimnya perhatian literatur terhadap hambatan dari sisi manusia (SDM). Jika 14 dari 16 studi berfokus pada perangkat keras (infrastruktur), hanya segelintir studi (4 dari 16) yang mulai bergeser untuk membahas perangkat lunak (manusia dan keterampilannya).

Analisis terhadap 4 studi ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang hambatan SDM masih sangat di permukaan. Temuan-temuan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua:

1. **Hambatan Psikologis (Mindset):** Laporan Google Temasek Bain Economy SEA (2022) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM khususnya generasi yang lebih tua mengalami *technology anxiety*, seperti takut salah menekan tombol, kekhawatiran menjadi korban penipuan digital, serta keyakinan bahwa mereka "terlalu tua untuk belajar" teknologi baru. Survei [9] turut menegaskan bahwa hambatan psikologis ini menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat adopsi teknologi digital di sektor UMKM [10].
2. **Hambatan Keterampilan Dasar (Literasi):** Menurut UNESCO (2023) dan laporan Kominfo (2022), tingkat literasi digital fungsional UMKM di wilayah non-perkotaan masih rendah. Hambatan ini mencakup kesulitan membuat foto produk yang layak, keraguan dalam menanggapi ulasan pelanggan, serta ketidakmampuan memahami alur transaksi e-commerce. Keterbatasan literasi digital ini menjadi penghalang nyata dalam pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan produktivitas dan ekspansi usaha [11], [12].

Pembahasan: Area Buta Literatur terhadap Konteks Sosio-Kultural Ini adalah area yang paling kurang dieksplorasi (*severely under-explored*) dan bisa jadi merupakan kesenjangan penelitian (*research gap*) paling kritis yang kami temukan. Kegagalan literatur untuk menggali lebih dalam dari sekadar "takut salah pencet" menunjukkan adanya "Miopisme Kultural" kegagalan untuk melihat dan memahami konteks unik sosio-kultural Maluku.

Literatur yang ada sama sekali belum menyentuh pertanyaan-pertanyaan krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan inklusi digital di lapangan:

1. **Adaptasi Rantai Pasok Tradisional:** Bagaimana strategi digitalisasi diterapkan pada UMKM Sagu atau Ikan Asar? Rantai pasok produk ini sangat tradisional, padat karya, dan sensitif terhadap waktu/cuaca. Literatur belum membahas bagaimana aplikasi digital bisa membantu nelayan mengelola stok ikan, atau bagaimana petani sagu bisa menggunakan *platform* untuk memprediksi permintaan, bukan hanya untuk "berjualan" produk akhir.
2. **Interaksi dengan Modal Sosial Lokal:** Bagaimana digitalisasi (yang seringkali bersifat transaksional dan anonim) berinteraksi dengan institusi budaya Maluku yang fundamental seperti "Pela Gandong"? Pela Gandong adalah sistem modal sosial yang berbasis pada kepercayaan (*trust*), resiprositas, dan relasi jangka panjang. Apakah *e-commerce* (yang berbasis *review* algoritmis) memperkuat atau justru mengikis model bisnis berbasis kepercayaan ini? Studi yang ada tidak memberikan jawaban.
3. **Untuk konteks pelatihan digital UMKM**, literatur asli menekankan pentingnya pelatihan berbasis komunitas, berkelanjutan, dan kontekstual. Misalnya, [13] menemukan bahwa program literasi digital yang digerakkan oleh perbankan di level pedesaan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap alat digital. Penelitian **Sunuantari, Zarkasi**, [3] memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa relawan R-TIK (ICT Volunteer) yang melakukan mentoring secara lokal mampu membangun literasi digital secara lebih efektif dibanding pelatihan generik. Sementara itu, [14] menyoroti bahwa kemampuan UMKM dalam menggunakan sistem administratif seperti e-tax sangat dipengaruhi oleh literasi digital mereka, yang harus diajarkan lewat pelatihan kontekstual. Selain itu, [15] menegaskan bahwa adopsi teknologi digital oleh UMKM tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada literasi lokal dan dukungan sosial, sehingga pelatihan yang menggabungkan aspek keterampilan teknis, pembelajaran berkelanjutan, dan keterlibatan komunitas terbukti meningkatkan efektivitas transformasi digital.

Singkatnya, literatur yang ada masih terjebak pada solusi teknis yang generik. Tidak ada satu pun dari 16 studi tersebut yang melaporkan atau menguji sebuah model pendampingan berkelanjutan yang dirancang secara spesifik dan kontekstual untuk budaya kepulauan Maluku. Kegagalan untuk memahami dimensi manusia dan budaya ini menjelaskan mengapa banyak program digitalisasi seringkali gagal diadopsi secara berkelanjutan.

3.4. Kekosongan Absolut Riset pada 'Pertumbuhan Inklusif'

Fokus Dangkal pada Metrik "Adopsi", Bukan "Dampak" Temuan tematik terakhir adalah yang paling mengkhawatirkan dan sekaligus paling signifikan: Dari 16 studi yang dianalisis, tidak ada satu pun (nol studi) yang ditemukan yang secara eksplisit, metodologis, dan empiris mengukur dampak digitalisasi UMKM terhadap indikator pertumbuhan inklusif.

Kami menemukan bahwa seluruh studi (100% dari 16 studi) yang ada di lanskap ini berhenti pada pengukuran *output* atau *adopsi* yang bersifat dangkal. Metrik-metrik ini mencerminkan "kesuksesan" digital sebatas pada aktivitas di permukaan, seperti:

1. **Tingkat Adopsi Platform:** Studi oleh Utomo & Setiyono (2024) menunjukkan bahwa pengukuran berbasis jumlah UMKM yang memiliki akun e-commerce atau terdaftar pada layanan seperti GoFood/Tokopedia tidak mencerminkan tingkat pemanfaatan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa banyak UMKM hanya membuat akun tanpa melakukan pengelolaan toko, pemasangan katalog, atau transaksi aktif, sehingga metrik ini hanyalah indikator input, bukan dampak.
2. **Peningkatan Omzet (Anekdotial):** Penelitian Rujitoningtyas et al. (2024) mengkritisi penggunaan data anekdotial berupa testimoni peningkatan omzet tanpa pengukuran longitudinal. Studi tersebut menekankan pentingnya metode before-after atau penggunaan control group untuk memastikan bahwa peningkatan omzet benar-benar disebabkan oleh digitalisasi dan bukan faktor eksternal lain seperti musim, permintaan lokal, atau fluktuasi harga.

3. **Adopsi Fitur (QRIS & Digital Payment):** Menurut penelitian Hamdani & Dura (2023), tingkat adopsi QRIS dan pembayaran digital mencerminkan efisiensi transaksi, namun belum cukup untuk mengukur dampak sosial-ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa meskipun adopsi QRIS meningkat, manfaat sosial seperti peningkatan pendapatan, perluasan pasar, atau penciptaan lapangan kerja memerlukan indikator yang lebih komprehensif. Singkatnya, literatur yang ada menyamakan "kesuksesan digital" dengan "sudah *online*", bukan dengan apa yang terjadi setelah *online*.

Pembahasan: Buta terhadap Pertanyaan Kebijakan Paling Kritis Kekosongan absolut ini menandakan bahwa diskursus akademis mengenai digitalisasi UMKM di Maluku gagal total menjawab pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang paling penting. Kita telah berfokus pada pertanyaan "Apakah UMKM menggunakan teknologi?", tetapi kita sama sekali tidak bertanya, "Apakah teknologi itu memperbaiki kehidupan masyarakat?"

Literatur yang ada tidak dapat memberi tahu kita:

1. Dampak pada Penyerapan Tenaga Kerja: Apakah digitalisasi UMKM di Ambon menciptakan lapangan kerja baru? (misalnya, membutuhkan admin media sosial, staf *packing*, atau tenaga produksi tambahan karena pasar meluas). Ataukah digitalisasi justru bersifat destruktif terhadap pekerjaan? (misalnya, adopsi *QRIS* atau sistem kasir *online* mengurangi kebutuhan akan tenaga kasir; otomatisasi pembukuan mengurangi kebutuhan tenaga administrasi). Kita tidak tahu.
2. Dampak pada Pemerataan (Inklusivitas): Siapa yang diuntungkan dari digitalisasi ini? Apakah digitalisasi menjadi alat inklusi bagi kelompok marjinal? Ataukah ia justru memperkuat ketimpangan yang ada? Literatur yang ada tidak bisa menjawab:
 - Apakah UMKM yang dipimpin perempuan di desa-desa mendapatkan manfaat yang sama dengan UMKM yang dipimpin laki-laki di pusat kota?
 - Apakah digitalisasi menciptakan "juara digital" baru (misal, pemuda yang melek teknologi) ataukah ia memperlebar jurang antara UMKM yang sudah mapan (memiliki modal untuk beriklan, *branding*, dan logistik) dengan UMKM mikro yang berjuang sendirian?
3. Dampak pada Ketimpangan Spasial (Regional): Apakah digitalisasi membantu mengurangi ketimpangan antara Ambon yang sudah maju dengan kabupaten-kabupaten kepulauan lainnya? Ataukah ia justru memperburuk "Bias Ibukota" (seperti yang dibahas di 3.1) dengan memusatkan semua keuntungan ekonomi digital di Ambon, sementara daerah lain semakin tertinggal karena hambatan infrastruktur dan logistik?

Kesimpulan dari Kesenjangan Ini: Kita tidak tahu jawabannya, karena tidak ada satu pun dari 16 peneliti tersebut yang menanyakannya. Fokus kolektif dari literatur yang ada masih terjebak pada paradigma "pertumbuhan ekonomi" (omzet, efisiensi, profitabilitas individu UMKM), dan secara total mengabaikan paradigma "pertumbuhan inklusif" (pemerataan, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, partisipasi kelompok rentan). Implikasinya sangat serius: Pemerintah dan lembaga pembangunan di Maluku saat ini "terbang buta". Mereka mendorong kebijakan digitalisasi tanpa memiliki data atau bukti empiris sedikit pun mengenai apakah intervensi tersebut pada akhirnya membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, atau justru secara tidak sengaja memperburuknya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa studi inklusi digital UMKM di Maluku masih sangat terbatas, terpusat di Ambon, dan terlalu fokus pada infrastruktur. Kajian yang ada belum menggambarkan kondisi UMKM di pulau lain dan sektor unggulan. Hambatan nonteknis seperti literasi, konteks budaya, dan adaptasi rantai pasok kurang dibahas. Tidak ada studi yang mengukur dampak digitalisasi pada pertumbuhan inklusif. Ini membuat kebijakan berjalan tanpa dasar bukti yang kuat. Penelitian selanjutnya perlu menggeser fokus dari infrastruktur ke SDM dan budaya lokal, memperluas studi ke berbagai pulau, serta mengukur dampak nyata seperti penciptaan kerja, pemberdayaan perempuan, dan ketimpangan. Pemerintah perlu mengalihkan anggaran dari proyek teknologi ke pendampingan

UMKM, merancang strategi berbasis konteks wilayah, dan memakai indikator keberhasilan yang menilai inklusivitas, bukan sekadar jumlah UMKM yang dilatih atau memakai platform digital.

Referensi

- [1] K. K. dan U. K. M. RI, "Laporan Perkembangan UMKM Indonesia Kuartal II 2024," 2024. [Online]. Available: <https://kemenkopukm.go.id>
- [2] R. Heeks, *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge, 2017. doi: 10.4324/9781315652603.
- [3] I. Manik Sunuantari, I. R. Zarkasi, I. Gunawan, and R. M. Farhan, "R-TIK Digital Literacy towards Indonesian MSMEs (UMKM) Digital Energy of Asia," *J. Komun.*, vol. 13, no. 2, 2021, doi: 10.18196/jkm.12380.
- [4] "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024," 2020.
- [5] D. Tranfield, D. Denyer, and P. Smart, "Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge through systematic review," *Br. J. Manag.*, vol. 14, no. 3, pp. 207–222, 2003, doi: 10.1111/1467-8551.00375.
- [6] B. Kitchenham, "Procedures for Performing Systematic Reviews," Keele University, 2004.
- [7] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qual. Res. Psychol.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706qp063oa.
- [8] W. Bank, "Digital Dividends: Leveraging Digital Technologies for Development," 2022. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>
- [9] APJII, "Laporan Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023," 2023. [Online]. Available: <https://apjii.or.id/survei2023>
- [10] Google, Temasek, and B. & Company, "e-Conomy Southeast Asia Report 2022," 2022. [Online]. Available: <https://economysea.withgoogle.com>
- [11] UNESCO, "Digital Literacy Global Framework," 2023. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org>
- [12] Kominfo, "Indonesia Digital Literacy Index 2022," 2022. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id>
- [13] C. N. Rujitoningtyas, E. R. Nugraha, H. D. Laksana, Y. Apriyanto, and N. G. Dewi, "Enhancing Digital Literacy for Business Development in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through Banking Initiatives at the Rural Level in Indonesia," *J. Akunt. Bisnis*, 2024, doi: 10.47686/jab.v10i02.735.
- [14] M. R. Hamdani and J. Dura, "Strengthening the local economy: Measuring the digital literacy of UMKM towards the efficiency of electronic tax reporting," *J. Ilm. Bisnis dan Ekon. Asia*, vol. 18, no. 3, 2023, doi: 10.32815/jibeka.v18i3.2178.
- [15] B. Utomo and Y. Y. Setiyono, "Leveraging Digital Technology in Micro SMEs to Enhance Indonesia's Economic Prosperity," *J. Lemhannas RI*, vol. 12, no. 3, pp. 391–402, 2024, doi: 10.55960/jlri.v12i3.985.